

PEMBINGKAIAN BERITA UKP3R ( UNIT KERJA PRESIDEN UNTUK  
PENGELOLAAN PROGRAM DAN REFORMASI ) DI SURAT KABAR MEDIA  
INDONESIA DAN JAWA POS

Oleh  
Juwito  
Ilmu Komunikasi FISIP-UPN"Veteran" Jatim

ABSTRACT

Born institution of UKP3R in cabinet of President Susilo Bambang Yudhoyono generating polemic. As solution of polemic about UKP3R focussed at forming chronology, duty and function of UKP3R related to system coordinate which have preexisted in cabinet, membership formator of UKP3R, until to issue of reshuffle in cabinet

Researcher use analysis of framing property of Zhondang Pan and of Gerald M Konciski to operate on news both the newspaper in around conflict of UKP3R, framing can be analyzed through syntax mechanism, scrip, thematic, and retorics of daily news Media Indonesia and Jawa Post so that discourse ideology developed both the daily can in detail expressed

Result of analysis framing polemic of UKP3R can be concluded that Media Indonesia more aim not to dribble problems of political UKP3R by the ears between President of Susilo Bambang Yudhoyono with Vice President of Jusuf Kalla. But, positioning the problems in corridor difference of discourse about duty and function of Jusuf Kalla as Vice President, system in Indonesia assessed do not place Vice President as governance elite determining policy of national. While Jawa Post see UKP3R as an policy of President politics of Susilo Bambang Yudhoyono of role of Vice President of Jusuf Kalla in cabinet, mentioned seen from duty and function of UKP3R much the same to with duty of Jusuf Kalla in cabinet

Keyword : syntax mechanism, scrip, thematic, and retorics

INTISARI

Lahirnya institusi UKP3R di dalam kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menimbulkan polemik. Adapun pembahasan polemik tentang lahirnya UKP3R difokuskan pada kronologi pembentukannya, fungsi dan tugas UKP3R dikaitkan dengan sistem koordinasi yang sudah ada sebelumnya di dalam kabinet, formatur keanggotaan UKP3R, sampai kepada isu reshuffle di dalam tubuh kabinet.

Peneliti menggunakan analisa framing milik Zhondang Pan dan Gerald M Konciski untuk membedah pemberitaan kedua surat kabar tersebut seputar konflik UKP3R, framing dapat ditelaah melalui mekanisme sintaksis, skrip, tematik, dan retorik dari pemberitaan harian Media Indonesia dan harian Jawa Pos sehingga ideologi wacana yang dikembangkan oleh kedua harian tersebut dapat secara detail terungkap.

Hasil analisa framing atas polemik UKP3R dapat disimpulkan bahwa Media Indonesia lebih bertujuan untuk tidak menggiring permasalahan UKP3R dalam pertikaian politik antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Namun, memposisikan permasalahan tersebut dalam koridor perbedaan wacana tentang fungsi dan tugas Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden, sistem ketatanegaraan di Indonesia dinilai tidak menempatkan Wakil Presiden sebagai elite pemerintahan yang menentukan kebijakan nasional. Sedangkan Jawa Pos melihat lahirnya UKP3R sebagai suatu kebijakan politik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atas peran Wakil Presiden Jusuf Kalla di dalam kabinet, hal tersebut terlihat dari fungsi dan tugas UKP3R hampir sama dengan tugas Jusuf Kalla di dalam kabinet.

Kata kunci : mekanisme sintaksis, skrip, tematik, dan retorik

## PENDAHULUAN

Setelah demokrasi pancasila yang dianut negara sebagai sistem politik mengalami reformasi, para penyelenggara negara kabinet Indonesia bersatu mempunyai komitmen yang sangat besar dalam mewujudkan apa yang dicita - citakan dalam reformasi. Yaitu, membangun postur pemerintah yang bersih dan berwibawa dengan memperhatikan kepentingan masyarakat banyak. Dengan diberdayakannya DPR pada era reformasi akhirnya lembaga tersebut dapat berfungsi secara maksimal. Salah satunya, DPR dapat membatasi kekuasaan lembaga kepresidenan dengan hak kontrol - kontrolnya dalam arti menjaga supaya semua tindakan presiden dalam membentuk kebijaksanaan publik sesuai dengan kebijaksanaan - kebijaksanaan yang telah ditetapkan. Maka negara Indonesia yang menganut sistem pemerintahan presidensial yang dalam tatanan pemerintahannya dipimpin oleh seorang presiden yang berkedudukan sebagai kepala pemerintahan yang dibantu oleh seorang wakil presiden tidak akan bisa sewenang - wenang dalam pengambilan setiap kebijakan dan keputusan.

Sekarang ini, masyarakat dan bangsa Indonesia telah memasuki era reformasi tentu saja hal tersebut, diwarnai oleh kehendak untuk mengadakan perubahan sosial secara besar - besaran dalam segala dimensi kehidupan. Terutama dalam bidang pendidikan, ketika memasuki tahun 1990-an, kemampuan baca tulis bagi orang dewasa telah mencapai lebih dari 74%. Tambahan pula, sekarang ini di Indonesia terdapat sekitar 50 perguruan tinggi negeri dan lebih dari 1200 perguruan tinggi swasta (Afan Gaffar : 392). Implikasi dari kenyataan ini terhadap peningkatan pemberdayaan masyarakat jelas luas sekali, terutama dalam peningkatan kapasitas masyarakat dalam memahami persoalan sosial dan politik di sekitar kehidupan mereka.

Melalui media massa, informasi yang disampaikan akan menjadikan

masyarakat mempunyai persamaan hak dan kewajiban, persamaan status, fungsi dan peranannya sebagai manusia sehingga dapat menikmati keterbukaan dan demokratisasi. Media massa juga memiliki kekuatan dan kepentingan yang sangat signifikan dalam usaha mempengaruhi khalayaknya, seperti dikemukakan oleh Althusser dan Gramsci dalam Sobur (2004 : 30) disamping kepentingan ideologi antara masyarakat dan negara, maka dalam diri media massa juga terselubung kepentingan - kepentingan yang lain, misalnya kepentingan kapitalisme pemilik modal dan kepentingan keberlangsungan lapangan pekerjaan bagi karyawan.

Karena itu adalah hal yang masuk akal jika media massa kini telah diperalat untuk mencapai kepentingan - kepentingan tertentu. Untuk kepentingan politik, misalnya, pengalaman menunjukkan bahwa media massa telah terbukti mampu berperan sebagai salah satu saluran efektif propaganda berbagai kekuatan politik (Asep Saeful Muhtadi, M.A 1999)

Wajar saja jika suasana seperti itu tercipta, karena media massa merupakan bagian dari sistem politik yang mengkomunikasikan pesan - pesan dengan bertujuan untuk membuat masyarakat menjadi tahu tentang segala hal sesuatu yang terjadi baik menyangkut dirinya ataupun lingkungannya. Hal ini didasari karena media massa kepemilikannya, dimiliki oleh pemerintah dan organisasi sosial politik tertentu. Yang visi dan misinya dibangun dan diciptakan oleh masing - masing media itu sendiri. Jadi dalam menyuguhkan berita, media massa berhak menyeleksi, mensistemasi dan menyunting informasi agar dapat menampilkan fakta yang akurat dan dapat dipercaya oleh khalayak.

Kekuatan sosial yang dimiliki oleh media massa mempunyai kontrol secara bebas dan bertanggung jawab dalam menanamkan sikap pro ataupun kontra terhadap kebijakan pemerintah kepada setiap khalayaknya ataupun masyarakatnya. Maka tidak heran jika pejabat pemerintahan seringkali menjadikan media massa sebagai

kepanjangan tangan kekuasaan dalam arti saluran informasi yang turut berpartisipasi dalam mensukseskan pembangunan yang sedang dan akan diselenggarakan pemerintah. Seperti yang dikemukakan oleh McLuhan dalam Asep Saeful Muhtadi, M.A (1999 : 05) bentuk media apa saja yang bisa mempengaruhi audiennya. Sebab medium saja sudah menjadi pesan. Begitu terjadi kontak antara manusia dengan media massa, media itu sudah secara otomatis bekerja mempengaruhi pemakainya. Lewat teorinya yang disebut “teori perpanjangan tangan alat indera”.

Sebuah berita dapat dikatakan sebagai berita yang layak di muat dalam media massa khususnya media cetak apabila dalam berita tersebut terdapat nilai berita (News Value), nilai berita ini akan menjadi panduan bagi wartawan untuk menentukan realitas seperti apa yang layak untuk diberitakan dan realitas seperti apa pula yang tidak layak untuk diberitakan. Semakin banyak nilai berita, maka semakin besar pula kemungkinan dari realitas tersebut untuk diberitakan. Namun sebaliknya, semakin sedikit nilai berita, semakin kecil pula kemungkinan dari realitas tersebut turut diberitakan. Berita yang memiliki nilai berita paling banyak dan paling tinggi, semakin besar kemungkinannya menjadi headline, sebaliknya berita yang sedikit atau rendah nilai beritanya, semakin kecil kemungkinannya untuk menjadi headline.

Pada era reformasi seperti saat ini, pers telah menjadi leluasa dan semakin terbuka dalam menyampaikan isi dari pemberitaannya. Seperti halnya berita pembentukan unit baru didalam lembaga kepresidenan, yaitu terbentuknya UKP3R yang sempat menimbulkan silang pendapat, baik dari kalangan pejabat pemerintahan, kalangan akademisi, dan masyarakat Indonesia sendiri.

Hingga kini kinerja dalam pemerintahan SBY - JK belum ada hasil yang memuaskan malah menambah angka kemiskinan, pengangguran, investasi yang mandek, dan lain - lain. Maka pada 16 Mei

2006, KPK menyampaikan Program Reformasi Birokrasi kepada Presiden, dengan alasan : kualitas birokrasi Indonesia tidak sepadan dengan tingkat perkembangan pembangunan, integritas aparatur birokrasi berada di bawah tingkat yang didambakan publik, kepastian hukum sering diabaikan sehingga korupsi merajalela. Sehingga pada 20 Juni 2006, KPK menyampaikan surat kepada Presiden untuk membentuk tim kepresidenan dan menyarankan implementasi lanjutan reformasi birokrasi di peradilan, lingkungan penegakan hukum, sektor penerimaan Negara (BPN, BUMN, dll) dan sektor perizinan. Mencermati kenyataan atas desakan perombakan karena buruknya kinerja kabinet tersebut, presiden SBY kemudian menyetujui usulan KPK tersebut dengan terbitnya Keppres RI No. 17 Tahun 2006 Pasal 3 ayat 2 tentang Pembentukan Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program dan Reformasi (UKP3R). Dengan tugasnya secara umum ada lima, yaitu mewujudkan perbaikan iklim usaha/investasi, pelaksanaan reformasi administrasi pemerintahan, perbaikan kinerja BUMN, perluasan peranan usaha kecil dan menengah, serta perbaikan penegakan hukum. Dan sesuai fungsinya, UKP3R dalam Keppres RI No. 17 Tahun 2006 Pasal 4, antara lain : membantu Presiden menetapkan sasaran perubahan dan prioritas pencapaian kemajuan yang harus dilakukan dalam waktu tertentu, membantu Presiden menemukan kelemahan dalam pelaksanaan program dan reformasi serta cara mengatasinya, menampung saran dan keluhan masyarakat dan dunia usaha

Menurut Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng, UKP3R hanya akan mengawasi kinerja pemerintah sehari - hari dan memberikan laporan secara langsung dari lapangan kepada presiden. UKP3R juga akan memberikan masukan, solusi dan rekomendasi yang tepat jika ada kebuntuan dalam pelaksanaan kebijakan Presiden. Sehingga jika dianalogikan, UKP3R dapat dianggap sebagai pemantau dan “pembisik” untuk Presiden. Apabila dicermati, fungsi

unit kerja presiden bermasa kerja 3 tahun ini adalah memberikan masukan, pendapat, nasehat atau pertimbangan atas suatu masalah tertentu kepada Presiden.

Secara legal formal, pembentukan UKP3R tidak melanggar konstitusi, karena sepenuhnya hak prerogatif presiden. Apalagi, hak presiden itu dijamin dalam pasal 16 UUD'45 hasil amandemen yang memberi ruang kepada presiden mengangkat staf khusus dan penasehat kepresidenan untuk membantu tugasnya menjalankan roda pemerintahan. Namun, dalam kenyataannya, dengan terbentuknya UKP3R malah menimbulkan permasalahan yang menyebabkan terjadinya dua informasi yang bertolak belakang, antara lain jalan terus atau dibekukan.

Peranan media sendiri ketika membentuk realitas dapat dilihat dalam berbagai tingkatan. Pertama, adalah bagaimana media membingkai peristiwa dalam bingkai tertentu. Yaitu peristiwa - peristiwa yang kompleks tersebut disederhanakan sehingga membentuk pengertian dan gagasan tertentu. Sebab media juga agen bukan hanya bagian dari sebuah peristiwa. Peristiwa tersebut dipahami tetapi juga apakah peristiwa itu disetujui atau tidak. Kedua, media memberikan simbol - simbol tertentu pada peristiwa dan aktor yang terlibat dalam berita tersebut. Hal ini diperlukan untuk menentukan bagaimana peristiwa dipahami. Siapa yang dilihat sebagai pahlawan dan siapa sebagai lawan. Media bukan hanya mengutip apa adanya dari sumber beritanya. Akan tetapi dia juga memilih dan menyeleksi ucapan, serta menambah dengan berbagai ungkapan atau kata - kata yang ditampilkan. Semua ungkapan kata itu bias memberikan cerita tertentu ketika berita yang disuguhkan tersebut diterima oleh khalayak. Ketiga, media juga menentukan apakah peristiwa ditempatkan sebagai hal yang penting atau tidak. Maksudnya peristiwa yang ada itu apakah ditempatkan pada halaman pertama atau tidak, apakah ditulis secara bersambung atau tidak. Semua

pilihan tersebut adalah kemungkinan yang dapat diambil oleh media (Eriyanto, 2005 : 24).

Melihat dalam kasus pembentukan UKP3R tersebut, peranan media massa mempunyai kepentingan yang permanen dalam mempublikasikan konflik - konflik pribadi dan mengubahnya menjadi isu untuk perdebatan publik. Berbagai kalangan mulai dari pejabat pemerintahan, kalangan akademisi, dan masyarakat Indonesia menggunakan media berita sebagai sumber keterangan tentang apa yang sedang terjadi di dalam pemerintahan. Menurut Dan Nimmo dengan memantau berita, pembuat kebijakan menerima informasi dan interpretasi tentang apa yang sedang dilakukan dan dikatakan oleh pejabat yang lain, isyarat tentang strategi dan rencana, dampak berita, dan saran serta gagasan tentang jalan keluar permasalahan, baik dalam pikiran sesama pejabat maupun dalam opini rakyat, massa, dan kelompok (Dan Nimmo : 211 ). Dalam pemberitaannya, pembentukan UKP3R yang berkembang di media massa terjadi secara simpang siur. Ada yang menyebutkan dibekukan, dinonaktifkan, diendapkan, dan sebagainya.

Dari realitas yang tertera di atas, maka sangatlah menarik bagi sebuah institusi media khususnya institusi media cetak untuk mengangkat dan menampilkan pemberitaan mengenai kasus pembentukan UKP3R di tahun 2006 ini sebagai berita yang layak muat dan dikonsumsi oleh masyarakat karena pada pemberitaan kasus pembentukan UKP3R mempunyai dampak terhadap stabilitas politik nasional, terkuaknya disharmoni dalam relasi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil presiden Jusuf Kalla. Wapres Kalla merasa tidak dilibatkan dalam pembentukan UKP3R yang menuai kontroversi tetapi harapan masyarakat Indonesia adalah kita jangan terfokus dalam permasalahan itu terus - menerus karena ada agenda - agenda besar yang lebih penting dan perlu mendapat perhatian serius, seperti pemberantasan korupsi, peningkatan pergerakan sektor riil,

kepastian hukum, dan pembenahan birokrasi.

Hal lain yang tidak kalah pentingnya menjadi alasan permasalahan ini cukup layak untuk ditampilkan dalam media massa khususnya media cetak, karena dari pemberitaan kasus pembentukan UKP3R di tahun 2006 ini akan dapat menambah khasanah pembaca media atau masyarakat dalam mengetahui fakta yang sebenarnya terjadi.

Untuk itu melalui media massa khususnya media cetak yang peneliti gunakan. Peneliti berharap, dari pemberitaan media cetak ini akan menyajikan berbagai pilihan - pilihan yang bervariasi, guna memberikan gambaran pada masyarakat mengenai bagaimana sebenarnya proses pembentukan itu terjadi, dan faktor - faktor apa saja yang mendasari pro dan kontra terkait kasus pembentukan UKP3R yang terjadi di tubuh pemerintahan SBY - JK.

Pada penelitian ini, media cetak yang peneliti gunakan sebagai subjek penelitian adalah surat kabar harian Media Indonesia dan surat kabar harian Jawa Pos, pemilihan kedua surat kabar tersebut yang notabene sebagai surat kabar berskala nasional serta mempunyai segmentasi pembaca yang cukup jelas, dan merupakan surat kabar yang mampu bertahan cukup lama, menurut Nielsen Media Research.

Sedangkan dalam frame Jawa Pos mengenai pembentukan UKP3R lebih menekankan pada konflik Presiden dan Wakil Presiden tentang lahirnya UKP3R. Jawa Pos memandang konflik tersebut dari konteks politik. Ini terlihat dari uraian pemberitaan yang memposisikan UKP3R sebagai lembaga yang bertugas untuk mengurangi peran Wakil Presiden dalam kabinet, yang telah disepakati dalam kontrak politik antara Presiden dengan Wakil Presiden mengenai pembagian tugas dalam kabinet. Dari kesepakatan tersebut bisa dimaknai bahwa Jawa Pos melihat Jusuf Kalla tidak hanya sebagai Wakil Presiden tapi juga sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

Secara penempatan berita Media Indonesia selalu menempatkan berita pembentukan UKP3R di halaman depan. Sedikit berbeda dengan Jawa Pos, bahwa dalam menempatkan beritanya hampir selalu pada halaman pertama dan juga beberapa pada halaman dua serta halaman khusus.

Dengan membandingkan pemberitaan yang sama pada dua media cetak yang berbeda, maka peneliti berharap akan dapat menemukan kesimpulan yang berbeda pula dari isi pemberitaan yang ada pada kedua media tersebut.

Untuk melihat secara jelas perbedaan - perbedaan media tersebut dalam menuliskan suatu berita, maka peneliti menggunakan analisis framing sebagai metode penelitian. Pengertian analisis framing sendiri merupakan salah satu alternatif model analisis yang dapat mengungkapkan rahasia dibalik semua perbedaan (bahkan pertentangan) media dalam mengungkapkan fakta. Melalui analisis framing akan dapat diketahui siapa mengendalikan siapa, siapa lawan siapa, mana kawan mana lawan, mana patron dan mana klien, siapa diuntungkan dan siapa dirugikan, siapa menindas dan siapa tertindas dan seterusnya (Eriyanto, 2005 : vi).

Sebagai analisis teks media, framing mempunyai prinsip kerja yang menyatakan bahwa terjadi adanya proses seleksi isu dan fakta tertentu yang diberitakan media. Fakta tidak ditampilkan apa adanya, namun diberi bingkai (frame) sehingga menghasilkan konstruksi makna yang spesifik. Jadi jelas dengan analisis framing dapat membongkar realitas yang ada tersebut dibingkai oleh media.

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini model yang peneliti gunakan adalah model framing model Zhondang Pan dan Gerald M. Kosicki, dimana model ini mengoperasionalkan empat dimensi struktural dalam teks, yang meliputi, sintaksis, skrip, tematik, dan retorik. Adapun

alasan pemilihan model framing Pan dan Kosicki ini, karena pada model ini pembahasan terhadap teks diuraikan dengan lebih detail dan jelas dalam aspek - aspek yang mempengaruhinya dalam empat kategori yang ada yaitu, sintaksis, skrip, tematik, dan retorik

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana media surat kabar harian Media Indonesia dan Jawa Pos membingkai pemberitaan pembentukan UKP3R 2006 pada edisi 3 s.d 10 Agustus 2006.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbandingan Media Indonesia dan Jawa Pos dalam model Zhongdang Pan dan Gerald M Kosicki.

Lahirnya UKP3R merupakan suatu fenomena sistem ketatanegaraan negara republik Indonesia dimana pembentukannya berdasarkan hak prerogatif presiden yang memberi keleluasaan kepada Presiden sebagai pemegang tertinggi pemerintahan untuk melakukan fungsi kontrol dan koordinasi dalam kabinet yang dipimpinnya.

Dari penelitian dengan menggunakan analisis framing model Pan dan Kosicki tersebut. Maka dapat diambil sebuah perbandingan secara umum dan khusus tentang konstruksi berita pembentukan UKP3R dari kedua harian Media Indonesia dan Jawa Pos. Dua media ini memiliki strategi wacana tersendiri dalam memaknai realitas yang ada, yang terlihat sebagai berikut.

Media Indonesia mengupas polemik UKP3R dalam konteks ketatanegaraan, hal tersebut terlihat dalam setiap teks berita selalu melibatkan presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi dibandingkan Wakil Presiden yang bersifat implementatif atas kebijakan yang dikeluarkan Presiden. Lahirnya UKP3R diwacanakan oleh Media Indonesia sebagai salah satu kelemahan dari sistem ketatanegaraan Indonesia, UKP3R lahir karena keterbatasan ruang kebijakan presiden di dalam kabinet dimana

komponen kabinet sebagian besar anggota partai politik di parlemen. Sistem kabinet presidensial menjadi tidak efektif ketika kebijakan eksekutif direspon keras oleh parlemen sehingga proses pemerintahan tidak dapat berjalan sesuai dengan program yang telah direncanakan hal tersebut juga menimbulkan percepatan pembangunan di segala bidang menjadi lambat.

Media Indonesia menekankan konflik UKP3R merupakan konflik persepsi soal manajemen pemerintahan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla ini terlihat dari penyeleksian beritanya sangat selektif soal pernyataan beberapa fungsionaris partai Golkar yang duduk di dalam parlemen.

Sedangkan harian Jawa Pos mewacanakan lahirnya UKP3R yang dibidani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menimbulkan konflik politik dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Hal tersebut sangat kental terlihat sejak kronologis pembentukannya sampai kepada pemberlakuan kembali UKP3R di dalam kabinet. Jawa Pos menempatkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai figur politikus yang menjadi pihak disudutkan oleh partai Golkar dimana Wakil Presiden Jusuf Kalla mempunyai jabatan Ketua Umum, hal tersebut terlihat dari penekanan pemberitaan tentang tidak diberitahukannya pembentukan UKP3R oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla meskipun secara legalitas kebijakan tersebut sah dalam hukum ketatanegaraan.

Ideologi Jawa Pos semakin terlihat ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengadakan pertemuan dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla dimaknai sebagai pertemuan politis ketimbang pertemuan protokoler kenegaraan, Jawa Pos menekankan Wakil Presiden Jusuf Kalla bukan sebagai pejabat negara dibawah Presiden namun memposisikannya sebagai seorang fungsionaris partai Golkar yang berseteru dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang lahirnya UKP3R. Jawa

Pos memaparkan di dalam pertemuan sebagai sebuah teater dimana kedua petinggi negara tersebut melakukan sandiwara kepada para khalayak umum seakan - akan tidak terjadi konflik di antara mereka. Jawa Pos juga menguraikan secara detail tentang kontrak politik yang mendasari koalisi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk maju dalam perhelatan pesta demokrasi atau pemilu pada tahun 2004 yang silam, lahirnya UKP3R dianggap oleh Partai Golkar tidak sesuai dengan semangat kontrak politik yang telah mereka setuju sehingga dikhawatirkan akan berdampak pada penarikan dukungan di dalam parlemen terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Sikap partai Golkar yang tidak setuju dengan pembentukan UKP3R semakin ditunjukkan oleh Jawa Pos melalui pemberitaan isu ketua UKP3R Marsillam Simanjuntak terlibat dalam dekrit pembubaran Partai Golkar pada era Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid yang lalu, isu politis tersebut mewacanakan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mempunyai niat terselubung terhadap Partai Golkar yang disinyalir akan merugikan kedudukan para kadernya di dalam kabinet.

Upaya Partai Golkar untuk menunjukkan ketidakpuasannya atas tetap dipertahankannya kelembagaan UKP3R di dalam kabinet menjadi tolak ukur bagi Jawa Pos dalam pembentukan ideologi wacananya bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mempunyai perbedaan persepsi politik dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla sebagai representasi Partai Golkar di dalam kabinet. Jawa Pos tetap mempertahankan prinsip keobyektifan dalam pemberitaannya dalam konflik kedua petinggi negara tersebut meskipun sudut pandang yang diambil sangat bertolak belakang dengan harian Media Indonesia yang mengacu pada perbedaan persepsi ketatanegaraan belaka semata antara Presiden dan Wakil Presiden atas terbentuknya UKP3R di dalam kabinet.

Persamaan kedua surat kabar harian tersebut dalam pembentukannya menimbulkan polemik. Media Indonesia mengangkat polemik pembentukan UKP3R dalam konteks wacana ketatanegaraan, hal tersebut dapat dimaklumi dari sudut pandang segmen pasar Media Indonesia lebih condong ke kalangan bisnis. Sebaliknya Jawa Pos mengangkat polemik UKP3R dalam konteks wacana politik, hal tersebut bisa dipahami sebagai strategi untuk menarik respon pembacanya mengingat harian Jawa Pos memiliki segmen pasar di semua stratifikasi masyarakat.

Frame Media Indonesia dan Jawa Pos tentang Pembentukan UKP3R.

Elemen	Media Indonesia	Jawa Pos
Frame	Lahirnya UKP3R diwacanakan sebagai fenomena dari sistem ketatanegaraan.	Lahirnya UKP3R diwacanakan sebagai upaya Presiden untuk mengecilkan peran Wakil Presiden di dalam kabinet.
Sintaksis	Terbentuknya UKP3R diposisikan dalam ranah ketatanegaraan baik dari fungsi kerjanya, koordinasinya sampai kepada wewenang yang dimiliki ditelaah secara detail dengan sistem ketatanegaraan yang dianut oleh negara republik Indonesia. Media Indonesia mengutamakan pendapat para narasumber yang mempunyai kompetensi dalam hukum ketatanegaraan untuk menyikapi terbentuknya UKP3R dalam kabinet.	Terbentuknya UKP3R diposisikan sebagai langkah politis Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menetralsir kepentingan Wakil Presiden Jusuf Kalla di dalam kabinet. Jawa Pos mengutamakan pendapat para narasumber yang mempunyai bobot politis untuk dikonfrontasikan dengan pendapat narasumber yang mendukung kebijakan Presiden.

Skrip	Dari keseluruhan skrip yang ada Media Indonesia menekankan bahwa pembentukan UKP3R merupakan perdebatan wacana antara Presiden dan Wakil Presiden untuk menciptakan keoptimalan kinerja kabinet dengan mempergunakan fasilitas ketatanegaraan yang ada. Perdebatan tersebut merupakan sebuah kronik demokrasi dimana masing-masing pihak mempunyai visi dan misi yang berbeda satu sama lain tentang eksistensi UKP3R di dalam kabinet.	Dari keseluruhan skrip yang ada Jawa Pos menekankan bahwa lahirnya UKP3R menimbulkan pertikaian politik antara Presiden dan Wakil Presiden, pertikaian tersebut dipaparkan sebagai suatu pertarungan politik di dalam kabinet dimana masing-masing pihak mempunyai bargaining position seimbang atau sama lain sehingga solusi yang disepakati adalah pengakomodasian saran salah satu pihak tanpa harus mengorbankan tugas dan fungsinya di dalam pemerintahan.
Tematik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pembentukan UKP3R merupakan hak prerogatif Presiden.</li> <li>2) Berusaha mencairkan konflik dengan menekankan suasana pertemuan yang mesra dan akrab.</li> <li>3) Hasyim Muzadi mendukung keputusan presiden mengenai di bekukannya unit tersebut.</li> <li>4) Upaya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam menyusun prosedur teknis kerja UKP3R.</li> <li>5) Pernyataan Laode Ida dan Ismed Hasan Putro seputar polemik yang berpendapat bahwa konflik UKP3R akan berdampak negatif pada stabilitas perekonomian bangsa Indonesia dan menyarankan agar masalah UKP3R direspons sebatas wacana demokrasi.</li> <li>6) Penyusunan tata kerja UKP3R merupakan langkah konstruktif Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menciptakan sistem manajemen pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan program dan agenda reformasi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sikap partai Golkar yang gerah atas terbentuknya UKP3R.</li> <li>2) Pertemuan antara Presiden dan Wakil Presiden merupakan pertemuan politis dengan menjelaskan substansi pertemuan.</li> <li>3) Pernyataan Din Syamsuddin dan Hasyim Muzadi kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar segera membubarkan UKP3R.</li> <li>4) Uraian mengenai kandasnya UKP3R dikarenakan terbentur kontrak politik Dwitunggal.</li> <li>5) Kesaksian dan bantahan dari Nursyahbani Katjasungkana dan Laode Ida makin mengindikasikan sikap Partai Golkar menolak kehadiran Marsillam.</li> <li>6) Penyusunan tata kerja UKP3R yang melibatkan Wakil Presiden Jusuf Kalla secara total merupakan sikap melunak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atas berbagai kritikan dari para praktisi politik khususnya partai Golkar.</li> </ol>
Retoris	Unsur leksikon, metafora dan grafis yang ditekankan sering disajikan secara implisit atau mengaburkan informasi yang sebenarnya terlihat dari pemberitaan permasalahan UKP3R hanyalah permasalahan di dalam sistem ketatanegaraan saja. Dengan menggunakan gaya bahasa eufemisme (pilihan kata yang dihaluskan).	Unsur leksikon, metafora dan grafis yang ditekankan sering disajikan secara eksplisit dengan diinformasikannya secara terbuka kepada pembaca bahwa telah terjadi konflik politik antara Presiden dan Wakil Presiden yang menyebabkan pertarungan pernyataan para elite politik. Dengan menggunakan gaya bahasa hiperbolis (bertele - tele dengan memperlebar permasalahan konflik atas terbentuknya UKP3R).



## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Dari data-data yang telah ditampilkan pada bab-4 yakni Hasil dan pembahasan, atau dari hasil penelitian analisis framing model Zhondang Pan dan Kosicki, tentang pembentukan UKP3R (Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program dan Reformasi) dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa :

1. Penggambaran berita pembentukan UKP3R (Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program dan Reformasi), baik Media Indonesia maupun Jawa Pos dalam memberitakan berita pembentukan UKP3R ini, sama - sama berjumlah 6 item berita dengan total 12 item berita keseluruhan. Pemberitaan Media Indonesia cenderung implisit dalam mengkonstruksi beritanya dan persuasif. Unsur retorik yang disajikan kepada pembacanya, sering memakai gaya bahasa eufemisme dalam menggunakan pilihan - pilihan kata dan kalimat yang digunakan untuk mengaburkan informasi dengan membelokkan secara halus, bahwa konflik UKP3R lebih ke arah ketatanegaraan. Sedangkan harian Jawa Pos mempunyai konstruksi pemberitaan yang menonjolkan pembentukan UKP3R menyebabkan konflik politik, Jawa Pos terus konsisten dalam menyajikan liputannya dengan menunjukkan adanya pertarungan para elit politik. Bahasa dan pilihan kata yang digunakan cenderung hiperbola dan eksplisit, sehingga dalam sajian beritanya terdapat pengadukan emosi. Jawa Pos cenderung melebarkan tema pemberitaan yang ada, sehingga penyajian permasalahan UKP3R diinformasikan secara jelas terjadi pertarungan para elit politik.
2. Harian Media Indonesia membentuk konstruksi berita pembentukan UKP3R, terkesan bias dalam memposisikan kapasitas sikap penolakan Wapres apakah sebagai aparatur negara atau sebagai Ketua Partai Golkar.

Penggambaran pribadi Jusuf Kalla sebagai sumber berita mempunyai kedudukan sejajar ( equal ) dengan subyek pemberitaan yaitu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tampaknya Media Indonesia berusaha menyembunyikan posisi dan background Jusuf Kalla sebagai Ketua Partai Golkar melalui penegasan Andi Malarangeng Juru Bicara Kepresidenan tentang posisi Jusuf Kalla sebagai representasi kader Partai Golkar seusai bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, "Pertemuan itu, tambahnya, juga mengindikasikan masih baiknya hubungan antara Presiden dan Partai Golkar." Media Indonesia berusaha meredam emosi pembaca terlihat dengan tidak menguraikan hal - hal spesifik tentang kontroversi yang berujung pada penghentian operasional UKP3R dalam kabinet. Hal tersebut bertujuan untuk tidak menggiring permasalahan UKP3R dalam pertikaian politik antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla namun memposisikan permasalahan tersebut dalam koridor perbedaan wacana yang biasa terjadi dalam praktek ketatanegaraan yang demokratis.

3. Harian Jawa Pos mengkonstruksikan berita pembentukan UKP3R lebih ditekankan pada respons partai Golkar atas pembentukan UKP3R oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tanpa melibatkan Wakil Presiden Jusuf Kalla, sudut pandang tersebut digunakan supaya pemberitaan bersifat eksplisit dan bombastis. Jawa Pos mewacanakan kepada pembaca bahwa pertemuan antara Presiden dan Wakil Presiden merupakan pertemuan politis, ini terlihat dari penggunaan kalimat "Presiden dan saya sepakat" yang mempunyai makna bahwa kedudukan mereka satu sama lain adalah setingkat sebagaimana layaknya pihak - pihak yang ingin membicarakan suatu perjanjian. Penggambaran pertikaian politik antara Partai Golkar

dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terlihat dari upaya Jawa Pos mewacanakan track record Marsillam Simanjuntak sebagai individu yang terlibat langsung dalam pertikaian politik atas penunjukannya sebagai Kepala UKP3R pada pemberitaan “Bukan Konseptor Pembubaran Golkar” dan pernyataan dukungan kedua organisasi masyarakat semakin memanaskan suasana konflik UKP3R pada pemberitaan “NU – Muhammadiyah Dukung Kalla” hal tersebut terlihat adanya upaya konsolidasi politik dari Wakil Presiden Jusuf Kalla kepada para tokoh organisasi masyarakat untuk memperoleh dukungan atas sikap Partai Golkar terhadap pembentukan UKP3R.

4. Media Indonesia cenderung membatasi porsi liputan dan ruang yang kecil sehingga tema yang disampaikan terlihat bias dan pandangan pemberitaannya subjektif sedangkan Jawa Pos mempunyai porsi liputan dan ruang yang besar sehingga tema yang disampaikan terlihat lebar dan berlebihan dengan menunjukkan fakta pertarungan antara kekuatan golongan politik.

#### Saran

Dari kesimpulan yang diperoleh, dapat dilihat bahwa masing - masing media, Media Indonesia dan Jawa Pos, memiliki perspektif penyimpulan yang berbeda dalam menggambarkan pembentukan UKP3R (Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program dan Reformasi). Dengan adanya wacana tersebut peneliti mempunyai saran : Jawa Pos hendaknya tidak menggunakan istilah yang berlebihan dan provokatif dalam pemberitaannya, sehingga tidak menimbulkan persepsi yang salah di mata khalayak.

Hendaknya Media Indonesia menghadirkan pemberitaan dengan ulasan yang lebih mendalam dan mendetail, sehingga tidak memberikan kesan bias dalam pemberitaannya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Djuroto, Totok, 2002, Manajemen Penerbitan Pers, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- McQuail, Dennis, 1991, Teori Komunikasi Massa, Jakarta : Erlangga.
- Sobur, Alex, 2002, Analisis Teks Media (Suatu pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing), Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Eriyanto, 2001 : Analisis Wacana, Yogyakarta: LKIS.
- , 2005 : Analisis Framing, cetakan III, Yogyakarta: LKIS.
- Marbun, B.N, 2002. Kamus Politik, cetakan II, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sudibyo, Agus, 2001, Politik Media dan Pertarungan Wacana, Yogyakarta : LKIS.
- Nugroho, Bimo, Eriyanto, 1999, Politik Media Mengemas Berita, Jakarta: ISAI.
- Siahaan, Hotman M, dkk, 2001, Pers Yang Gamang, Studi Pemberitaan Jajak Pendapat Timor Timur, Lembaga Studi Perubahan Sosial, Surabaya.
- Gaffar, Afan, 1999, Politik Indonesia (Transisi Menuju Demokrasi), Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muhtadi, Asep Saeful, 1999, Jurnalistik (Pendekatan Teori dan Praktik), Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu
- Fisher, Aubrey, 1986, Teori – teori Komunikasi, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Maleong, Lexy J, 2000, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Kurniawan, 2001, Semiologi Roland Barthez, Jakarta; Indonesiantara.
- Nimmo, Dan, 2001, Komunikasi Politik (Khalayak dan Efek ), cetakan III, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.